



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020  
Nomor: 02/PENG/PIM/RH.04.01/07/2020

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung dan Ad Hoc pada Mahkamah Agung serta dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 462/PIM/RH.01/07/2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung RI Tahun 2020, Komisi Yudisial mengundang warga negara yang terbaik untuk menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
5. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
6. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
8. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
10. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
11. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung dilakukan secara *online* melalui situs [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id) mulai tanggal 10 Juli s.d. 30 Juli 2020. Berkas pendaftaran yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi dibuat di atas kertas bermeterai;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dibuat di atas kertas bermeterai dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja/sertifikat/bukti terkait;
6. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi calon;
8. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus serta anggota partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik dibuat di atas kertas bermeterai;
9. Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan hakim ad hoc tindak pidana korupsi;
12. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dibuat di atas kertas bermeterai;
13. Pasphoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb diunggah di laman pendaftaran [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id);

Berkas terkait persyaratan disertai *softcopy* berkas yang dipindai ke dalam format PDF dan disimpan di media *flash disk/DVD* dimasukkan dalam map plastik untuk selanjutnya dikirim melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 30 Juli 2020 (cap pos).

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

**Ketentuan lain-lain:**

1. Panitia Seleksi **tidak menerima pendaftaran secara langsung** di Kantor Komisi Yudisial. Pertanyaan terkait pendaftaran *online* dan proses seleksi dapat disampaikan melalui *call center* Komisi Yudisial '187' atau alamat surat elektronik [rekrutmen@komisiyudisial.go.id](mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id) atau fasilitas *chat online* di laman [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id);
2. Berkas pendaftaran yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
6. Formulir-formulir surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di situs [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id).



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juli 2020  
Ketua,

ttd

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.